

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis terhadap hasil temuan di lapangan pada penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara faktual, Kebijakan Pembangunan Kawasan Pergudangan di Kota Tarakan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB maupun volume ekspor dan impor yang terus menunjukkan tren yang positif menuntut adanya sebuah desain kebijakan yang rasional komprehensif guna mengantisipasi tantangan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global.
2. Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini merujuk pada paradigma Aristokrasi atau pendekatan elit semata.
3. Kepentingan sektor privat atau para pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan telah terakomodir dengan baik. Akan tetapi mereka tidak terlibat secara aktif didalam perumusan kebijakan ini, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kebijakan ini direalisasikan akan terjadi resistensi dari usaha-usaha yang sedang berjalan terutama yang telah memiliki gudang mandiri secara permanen. Model pendekatan elitis dalam kebijakan ini hanya melihat pada aspek matematis yang bersifat materialistis.
4. Terdapat beberapa faktor penghambat yang bersifat eksternal dan internal. Hambatan secara **internal** seperti : *Pertama*, Belum adanya perangkat hukum yang lengkap berupa peraturan-peraturan daerah mengenai kegiatan, aturan administrasi, dan retribusi kegiatan pergudangan di Kota Tarakan. *Kedua*, Masih terdapatnya keterbatasan penyediaan prasarana pendukung kegiatan pergudangan. Hambatan secara **eksternal** seperti : *Pertama*, Maraknya konflik di daerah perbatasan seperti perdagangan ilegal (penyelundupan) antar wilayah regional dan internasional. *Kedua*, Persaingan antar daerah dalam pengadaan infrastruktur wilayah yang sejenis untuk menarik investor.

5. Pengembangan kawasan pergudangan Kota Tarakan setelah digambarkan dalam Kuadran IFAS-EFAS maka kawasan pergudangan Kota Tarakan terletak pada Kuadran I *Stable Growth*. Posisi tersebut menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang perlu ditempuh dalam pengembangan kawasan pergudangan Kota Tarakan adalah strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi kawasan sehingga pengembangannya sesuai dengan kemampuan kawasan pergudangan seperti daya dukung lahan, kemampuan ekonomi, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan sektor pendukung, kemampuan penyediaan prasarana dan sebagainya.

B. Saran

Dari hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam Kebijakan Pembangunan Kawasan Pergudangan di Kota Tarakan kedepan. Setelah melihat dan mencermati proses perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Pergudangan di Kota Tarakan, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan program tersebut adalah :

1. Perlunya koordinasi lintas sektoral antar instansi baik vertikal maupun horisontal (daerah) dalam konteks regulasi (perangkat hukum) maupun kebijakan institusional lain dalam rangka mem-*backup* kebijakan ini, adapun institusi yang dimaksudkan seperti Kelurahan, Kecamatan, DPRD, Disperindagkopin, Badan Pertanahan, BAPEDDA, PU\TRK, Bea dan Cukai, PLN, PDAM, Kepolisian, dan Lantamal.
2. Hegemonisasi Birokrasi Perlu diminimalisir dengan pendekatan *participatory planning* (khususnya pada *stakeholder* primer) dalam perumusan kebijakan lainnya kedepan, agar kepentingan publik dapat terpetakan dengan baik. Hal ini menjadi penting mengingat *stakeholder* primer adalah pemangku kepentingan yang bersingungan langsung dengan kebijakan tersebut.
3. Melibatkan *stakeholder* primer (para pelaku usaha/para pemilik gudang) dan masyarakat dalam perumusan draft rancangan peraturan daerah terkait dengan kebijakan ini.